

BAB VI PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan narasi antara pemerintahan dan masyarakat terkait dengan usulan PSN yang menyebabkan krisis dalam bentuk konflik agraria. Pemerintah menegakkan narasinya diatas dasar undang-undang serta kebijakan, sementara masyarakat berpedoman pada hajat hidup dan kesejahteraan mereka.
2. Pembentukan narasi pemerintah dilakukan melalui kebijakan yang disosialisasikan secara vertikal, mulai dari pemerintah provinsi hingga nagari bahkan kepada kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa mereka pro-PSN. Sementara itu pembentukan narasi masyarakat terjadi secara natural melalui kesadaran kolektif masyarakat.
3. Pemerintah memilih menggunakan strategi kehumasan defensif untuk mengurangi risiko munculnya krisis yang lebih besar. Di samping itu, model komunikasi yang dilakukan pemerintah tidak terjadi secara simetris yang menyebabkan munculnya krisis berkepanjangan. Pemerintah cenderung melakukan model komunikasi asimetris dengan hubungan relasi kuasa yang memaksa krisis untuk segera mereda. Untuk jangka panjang, metode seperti ini cenderung menjadi bom waktu karena krisis tidak benar-benar selesai dan meninggalkan jejak-jejak konflik yang sewaktu-waktu dalam muncul kembali dalam skala lebih besar.

1.2 Saran

Adapun saran yang bisa dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat dituntut untuk membuka diri dan tidak gampang terprovokasi oleh narasi-narasi yang mungkin saja akan bertentangan dengan berbagai pihak lain. Masyarakat dalam melaksanakan penolakan terhadap hal-hal yang merugikan sebaiknya mempersiapkan *support system* yang mumpuni dari segi materi unjuk rasa, akomodasi, relasi, dan dukungan media. Masyarakat juga sebaiknya membuka ruang dialog terhadap keputusan-keputusan yang diberikan oleh pemerintah, adanya fleksibilitas yang tidak merugikan kedua belah pihak.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan komunikasi yang simetris agar kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah dapat terwujud. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan analisis stakeholder agar informasi, materi, dan pesan-pesan pembangunan dapat

disosialisasikan secara merata. Komunikasi yang kaku perlu diperbaiki oleh pemerintah. Pemerintah harusnya terbuka terhadap dialog dan bersikap fleksibel dalam menghadapi resistensi masyarakat. Penggunaan relasi kuasa memang dapat menyelesaikan konflik dengan cepat, akan tetapi tidak memadamkan seluruhnya. Jika pemerintah bersikap abai dengan persepsi masyarakat tidak akan melakukan penolakan terhadap dengan memberikan tekanan-tekanan lewat jaringan kekuasaan, maka peluang konflik kembali muncul dengan skala lebih besar bisa saja terjadi.

3. Peneliti selanjutnya hendaknya dapat menggali lebih jauh terkait dengan penyebaran narasi menggunakan analisis jaringan komunikasi. Sebab penelitian hanya terbatas pada narasi-narasi yang muncul antara pemerintah dan masyarakat. Ada baiknya untuk melihat jaringan komunikasi agar memperjelas asal usul perbedaan narasi tersebut. Selain itu, penelitian ini lebih mendalami pada sudut pandang pemerintah dalam menyelesaikan konflik, penelitian selanjutnya dapat lebih didalami pada sudut pandang masyarakat mengenai penyelesaian konflik antara pemerintah-masyarakat.

